

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sudah memasuki era teknologi informasi yang mana pemerintah saat ini sudah harus menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government* muncul sebagai jawaban dari pemerintah akan pentingnya memanfaatkan teknologi informasi. *E-governemnt* dalam implementasinya juga mengalami perkembangan dan beraneka ragam bentuk, salah satunya adalah *open governemnt*.

Pelaksanaan Open Government di Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada *Open Government Partnership*, tujuan dari Keputusan Presiden ini adalah untuk mendukung upaya keterbukaan dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Selain itu, *Open Government* merupakan kewajiban Indonesia sebagai dalam OGP (*Open Government Partnership*). Menurut Schmidhuber (2016:2), inovasi untuk *open government* hadir saat organisasi publik semakin memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk membuka dan mengintegrasikan aktor eksternal (misalnya, warga negara, bisnis, universitas) ke dalam proses organisasi dan administrasi. Upaya pemerintah untuk mengintensifkan hubungan warga negara mencakup informasi publik yang transparan, proses pengambilan keputusan partisipatif, dan bentuk kolaborasi kolaboratif berbasis platform baru.

Pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluarkan kebijakan berupa Perda Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik. Dalam perda tersebut pemerintah Kabupaten Banyumas memasukan unsur *e-government* dan *open government* dalam urusan pelayanan publik. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan serta mewujudkan keterbukaan pemerintah. Berangkat dari perda inilah kemudian pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan sebuah inovasi dalam pelayanan publik berupa pembentukan *website* www.banyumaskab.go.id dan aplikasi agar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas ini membuahkan sebuah prestasi yang diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) berupa INAGARA Award pada tahun 2017. Penghargaan tersebut diberikan karena pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memberikan pelayanan publik terbukti inovatif dan terbukti memberikan kemudahan untuk mengakses.

Hal yang menarik dari penerapan *open government* di kabupaten Banyumas adalah pemanfaatan aplikasi *Google PlayStore*. Aplikasi seperti *Lapor Banyumas*, *Info PDAM*, dan *Berita Banyumas* dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat Banyumas. Untuk pelayanan publik berbasis *website* pemerintah Kabupaten Banyumas juga memiliki www.banyumaskab.go.id. *Website* www.banyumaskab.go.id yang sudah tergolong rinci dan minim akan terjadinya *error*. Kualitas informasi dapat dikatakan sejajar dengan Kabupaten Sragen serta Kabupaten Bojonegoro. Di dalam www.banyumaskab.go.id terdapat jenis pelayanan publik secara online berupa *Perizinan Online*, *PPDB Online*, *Banyumas*

Open Data, Cetak Kartu Kuning, dan lain-lain. Penggunaan aplikasi dan pengelolaan *website* yang cukup rinci seperti inilah yang menjadi Kabupaten Banyumas dalam penerapan *open government* menjadi berbeda dengan pemerintah daerah lain.

Walaupun pemerintah Kabupaten Banyumas sudah melakukan langkah inovatif dalam usaha pemberian pelayanan, namun hal tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan preliminary research yang sudah dilakukan terhadap 23 orang masyarakat di Kabupaten Banyumas sebanyak 13 orang tidak mengetahui informasi adanya *website* ataupun aplikasi *google playstore* Kabupaten Banyumas. Dari 10 orang yang mengetahui informasi adanya *website* atau aplikasi *google playstore* Kabupaten Banyumas hanya 5 orang yang mengetahui informasi tersebut dari media pemerintah daerah dan 5 orang lainnya mencari tahu sendiri informasi pelayanan pemerintah Kabupaten Banyumas.

Perbedaan lainnya terdapat pada jumlah pengunjung *website* pelayanan publik yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Contohnya adalah jumlah pengunjung *website* dpmptsp.banyumaskab.go.id yang mengurus perizinan online berada di angka 20-40 orang pengunjung per hari atau sekitar 200-300 orang per minggu. Untuk jumlah total pengunduh aplikasi *google playstore* Kabupaten Banyumas yang terbesar adalah 1000 orang pengunduh dengan jenis aplikasi yang diunduh adalah *Info PDAM*. Jumlah pengunjung *website* ataupun pengunduh tersebut terkesan sangat rendah mengingat jumlah penduduk Kabupaten Banyumas berada pada angka 1,6 juta jiwa. Artinya masih banyak masyarakat

Banyumas yang belum pernah mengakses baik *website* ataupun aplikasi pelayanan publik yang ada.

Untuk masyarakat Kabupaten Banyumas yang belum pernah sama sekali mengakses *website* atau aplikasi umumnya mereka masih mendatangi secara manual instansi terkait untuk mendapatkan informasi. Fenomena tersebut membuat *open government* berbasis *e-government* yang diterapkan pemerintah Kabupaten Banyumas tidak efektif. Seharusnya masyarakat bisa mendapatkan informasi ataupun bentuk pelayanan lainnya hanya dengan waktu yang singkat, namun dalam realita mereka harus tetap datang ke instansi terkait dan memakan waktu yang cukup lama.

Ketimpangan antara pemerintah Kabupaten Banyumas dengan masyarakat menjadi terlihat, disisi pemerintah Kabupaten Banyumas mereka merasa sudah cukup menerapkan *open government* dengan www.banyumaskab.go.id dan aplikasi. Disisi masyarakat mereka masih belum mengerti dan belum mengetahui adanya informasi bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas menerapkan *open government* menggunakan *website* dan aplikasi. Kejadian seperti ini diduga masih adanya *digital divide* di kalangan masyarakat Kabupaten Banyumas. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai pelayanan publik berbasis *online* yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas membuat kebijakan *open government* belum maksimal.

Rendahnya jumlah pengunjung *website*, pengunduh aplikasi, ataupun pengetahuan masyarakat akan informasi pelayanan publik tersebut menunjukkan

bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mengkaji ulang pelaksanaan program *open government*. Keadaan seperti ini berbanding terbalik dengan penghargaan yang sudah diraih oleh pemerintah Kabupaten Banyumas berupa INAGARA Award di tahun 2017. Indikator utama yang digunakan sebagai penilaian dalam pemberian penghargaan tersebut terletak pada komitmen untuk melakukan inovasi berupa bukti dan kemudahan akses pelayanan. Kedua indikator tersebut dalam realita sudah terbukti dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, namun indikator tersebut tidak menilai akan tingkat pengetahuan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik di Kabupaten Banyumas. Penghargaan INAGARA Award yang diraih Kabupaten Banyumas terkesan ironi mengingat di sisi lain pemerintah Kabupaten Banyumas sudah melakukan inovasi tetapi keadaan di masyarakat masih banyak yang belum mengetahui atau bahkan belum pernah mencoba mengakses pelayanan publik yang ada.

Melihat keadaan yang saling bertolak belakang tersebut peneliti ingin mengetahui fenomena *digital divide* di Kabupaten Banyumas. Fenomena ini berkaitan dengan kritik masyarakat terhadap pelaksanaan Perda Nomor 29 Tahun 2016. Adapun syarat pelayanan publik dapat dikatakan efektif apabila masyarakat memiliki angka pengetahuan akan akses pelayanan yang tinggi, tepat sasaran kepada masyarakat, dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan perkembangan teknologi (Maksum:2008).

Digital divide atau kesenjangan digital merupakan jurang pemisah yang menyebabkan ketidakseimbangan antara individu, kelompok, rumah tangga, pelaku bisnis, maupun geografi untuk mengakses teknologi informasi yang berupa internet.

Istilah *digital divide* juga dapat merujuk pada penunjukan perbedaan antara mereka yang mempunyai kemampuan dalam hal akses dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi modern dengan mereka yang tidak berpeluang menikmati teknologi tersebut. Berdasarkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*, *digital divide* didefinisikan sebagai keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Selain itu juga disebutkan bahwa ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang kesenjangan digital. *Digital divide* di era teknologi informasi saat ini menjadi perhatian penting di berbagai negara untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di bidang teknologi informasi.

Berdasarkan upaya pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memberikan pelayanan publik dapat ditemukan adanya keterkaitan antara penerapan *open government* di Kabupaten Banyumas dengan kesenjangan digital yang terjadi dalam masyarakat. Keterkaitan tersebut terletak pada pola penerapan *open government* yang jika berjalan efektif, maka *digital divide* atau kesenjangan digital tidak akan terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Banyumas. *Digital divide* terjadi apabila kesenjangan antara masyarakat baik itu yang memiliki atau tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi yang disediakan oleh pemerintah (Prieger:2008).

Menekankan pentingnya pertumbuhan informasi menjadikan pemerintah harus mengikuti perkembangan teknologi informasi sebagai bentuk memberikan *service* atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Dewi:2013). Istilah *digital divide* itu sendiri sangat bervariasi dimana penjelasannya dapat menyangkut

berbagai dimensi yang memusatkan perhatian kepada kesenjangan masyarakat terhadap akses teknologi informasi. Selanjutnya pengukuran dalam *digital divide* juga memiliki berbagai macam metode, salah satunya adalah metode SIBIS (*Statistical Indicators Benchmarking the Information Society*). SIBIS merupakan hasil kegiatan dari komisi Eropa (European Commission) yang digunakan untuk menganalisa dan membandingkan berbagai macam indikator yang berbeda untuk mengukur kesenjangan digital (SIBIS:2003). Pengukuran kesenjangan digital menggunakan indikator SIBIS telah sukses diterapkan dalam pengukuran kesenjangan antar negara dalam masyarakat di Uni Eropa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah yang muncul dalam penerapan *open government* berbasis *e-government* di Kabupaten Banyumas yaitu bagaimana *digital divide* yang terjadi di warga masyarakat Kabupaten Banyumas, dan faktor apa yang menyebabkan *digital divide* muncul. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai proses *digital divide* yang ada dan faktor apa yang menjadi penyebab adanya *digital divide* dalam implementasi kebijakan *open government* di Kabupaten Banyumas. Jika faktor tersebut dapat ditemukan, diharapkan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk dapat segera mengatasi faktor permasalahan yang ada agar keberjalanan *open government* dapat terus menunjukkan kemajuan dalam pelayanan publik.

1.2 Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang sudah diuraikan dan agar penelitian ini dapat terarah pada sasaran serta menjaga agar pembahasan tidak terlalu luas ruang lingkungannya, maka perumusan masalah yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian terkait *Digital Divide* dalam Implementasi Kebijakan *Open Government* berbasis *E-Government* pada Kabupaten Banyumas, penulis menggunakan metode SIBIS (*Statistical Indicators Benchmarking the Information Society*) dalam menganalisis masalah yang ada pada pemerintah Kabupaten Banyumas. Adapun perumusan masalah tersebut :

1. Bagaimana *Digital Divide* yang muncul dalam Kebijakan *Open Government* berbasis *E-Government* di Kabupaten Banyumas ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya *digital divide* (kesenjangan digital) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis *Digital Divide* yang terjadi dalam implementasi Kebijakan *Open Government* berbasis *E-Government* di Kabupaten Banyumas.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *digital divide* (kesenjangan digital).

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu dasar atau acuan kebijakan dalam usaha mengatasi *digital divide* yang ada dalam implementasi

kebijakan *Open Government* berbasis *E-Government* di Kabupaten Banyumas.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu (*State Of The Arts*)

1. *Reengineering the open government concept: An empirical support for a proposed model* karya Emad A dan Abu Shanab

Di dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat 3 pilar utama dalam menjalankan *open government*. Ketiga pilar yang dimaksud adalah Transparansi, Partisipasi, dan Kolaborasi. Dari ketiga pilar tersebut mewakili aspek-aspek yang harus dikembangkan oleh pemerintah jika ingin melaksanakan kebijakan *open government*. Pilar-pilar tersebut harus berjalan sinergi dan sesuai dengan kapabilitas pemerintah. Selain itu, ketiga pilar tersebut juga sangat bergantung pada faktor internal organisasi agar dalam pelaksanaan *open government* dapat berjalan efektif. Penelitian ini dilaksanakan di negara Yordania dengan mengambil sampel masyarakat Yordania secara acak. Temuan selanjutnya dalam penelitian ini yaitu kebijakan *open government* tidak bisa diterapkan di semua negara berkembang. Penerapan kebijakan tersebut harus memperhatikan aspek kapabilitas pemerintah dan keadaan sosial budaya masyarakat. Sebelum menerapkan *open government* hal yang harus diperhatikan oleh setiap negara berkembang adalah kepada siapa informasi harus diberikan, lembaga, departemen, atau kedinasan mana yang harus melaksanakan, dan

bagaimana kesiapan pemerintah untuk mengatasi permasalahan baru mengenai *open government*.

2. *A prioritization-based analysis of local open government data portals : A case study of Chinese province level governments* karya Di Wang dan Chuanfu Chen.

Penelitian tersebut mengambil sampel 9 Provinsi yang ada di China dan hasilnya adalah 6 dari 9 Provinsi tersebut belum maksimal dalam menerapkan *open government* berbasis *e-government*. Pelaksanaan *open government* di negara China masih mengalami hambatan dan kurangnya persiapan dari pemerintah lokal di tingkat provinsi. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa faktor internal dari organisasi pemerintah seperti SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi sangat vital. Umumnya provinsi-provinsi di China hanya menyediakan tampilan *website*, namun di dalamnya masih minim akan informasi publik bahkan masih ada beberapa provinsi yang belum menampilkan informasi publik kepada masyarakatnya. Pengaruh SDM yang dimaksud adalah kualitas aparatur yang belum memenuhi syarat sebagai aparatur pengelola aset data pemerintah. Selam ini di negara China pengelolaan aset data pada awalnya diatur oleh pemerintah pusat, namun untuk alokasi data sepenuhnya berada pada kewenangan pemerintah tingkat provinsi. Pengelolaan aset data yang cukup masif tidak dibarengi dengan aparatur yang ahli mengelola aset data maupun *website*, sehingga aset data pemerintah hanya tersimpan sendiri. Akibatnya banyak masyarakat di negara China lebih memilih mengakses data dari pemerintah pusat dan

membuat pelaksanaan *open government* di tingkat provinsi menjadi tidak efektif.

3. *Determinants Of User Acceptance And Use Of Open Government Data : An Empirical Investigation In Bangladesh* karya Shamim Talukder, Liang Shen, dan Farid Hossain.

Penelitian tersebut mereka menggabungkan 2 teori yaitu teori UTAUT (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*) dan IS Success model. UTAUT adalah sebuah teori yang menilai individu dalam menerima informasi publik dari penggunaan *e-governement*. Sedangkan IS success model lebih menilai kualitas informasi publik dan kualitas sistem informasi yang disediakan oleh pemerintah dalam menjalankan *open government*. Penggabungan kedua teori tersebut menghasilkan suatu kesatuan yang saling berkesinambungan antara satu sama lain dan kedua teori juga dapat menilai kualitas dari *open government* yang sedang dilaksanakan. IS success model mewakili 2 unsur penting, yaitu kualitas informasi publik dan kualitas sistem informasi. Kedua unsur tersebut biasa digunakan pemerintah untuk mengembangkan model *e-government* ataupun *open government* sebelum diperkenalkan kepada masyarakat. Untuk UTAUT model mewakili 4 unsur utama, yaitu penilaian kinerja, penilaian usaha penyedia layanan, penilaian sosial, dan penilaian kondisi fasilitas penyedia layanan. Unsur-unsur tersebut juga harus diperhatikan pemerintah ketika melaksanakan *open government*. Dari penggabungan IS Success model dan UTAUT model dapat menilai keinginan masyarakat akan

menggunakan fasilitas *online* maupun akses data pemerintah. Berdasarkan penilaian tersebut juga menunjukkan pemerintah Bangladesh masih kurang memperhatikan unsur-unsur penting dalam UTAUT model ataupun IS Success model, sehingga masyarakat Bangladesh memiliki angka rendah terhadap keinginan mereka menggunakan fasilitas *e-government* negaranya sendiri.

4. *Open Government A Long Way Ahead for Romania* karya Lia Baltador dan Camelia Budac.

Penelitian tersebut menggambarkan secara umum mengenai pelaksanaan *open government* di Romania. Romania bergabung dalam *Open Government Partnership* (OGP) pada tahun 2012, akibat dari tahun 2006 hingga 2011 negara Romania mengalami penurunan kepercayaan publik terhadap akses data dan transparansi dana negara. Pelaksanaan *open government* di Romania tidak berjalan efektif karena masyarakatnya masih belum sepenuhnya percaya kepada pemerintah. Permasalahan ini disebabkan oleh banyak pejabat negara tersebut tidak menghormati keterbukaan pemerintah yang sudah mulai dilaksanakan semenjak tahun 2003 silam. Perilaku para pejabat pemerintah yang masih enggan untuk menghormati seperti itu lah yang menyebabkan masyarakat Romania perlahan tidak percaya dengan pemerintahnya sendiri. *Open government* yang dilaksanakan pemerintah Romania hingga tahun 2014 hanya sebatas informasi publik secara umum, tidak ada karakteristik khusus yang

dikembangkan dan bahkan masih sulit untuk mendapatkan transparansi keuangan negara.

5. *Motivations for open data adoption: An institutional theory perspective* karya Mohammed Saleh Altayar.

Penelitian ini menjelaskan perkembangan *open government* di pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia. Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif dan data yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. Pelaksanaan *open government* di Saudi Arabia dimulai pada tahun 2014. *Open government* tersebut juga dilaksanakan secara bersama dengan *e-government* Saudi Arabia. Pembaharuan tersebut dilakukan karena pemerintah Saudi Arabia harus mengikuti kemajuan teknologi dan tekanan dari banyaknya kaum intelektual di negara tersebut. Penemuan selanjutnya dari penelitian ini adalah faktor motivasi para pejabat maupun lembaga negara menjadi penyebab *open government* di Saudi Arabia segera dilaksanakan. Motivasi menjadi kunci utama dan penggerak setiap lembaga pemerintah Saudi Arabia. Dengan motivasi mereka sadar bahwa masyarakat harus dilayani sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan teknologi agar dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan indeks *e-government* tahun 2016, Saudi Arabia menduduki peringkat ke 55. Walaupun peringkat tersebut masih rendah namun komitmen dan motivasi penyelenggara pemerintah yang tinggi membuat pelaksanaan *open government* di Saudi Arabia patut diapresiasi.

6. Pengukuran Kesenjangan Digital Masyarakat Di Kota Pekalongan karya Dyah Listianing Tyas

Penelitian tersebut membahas bagaimana tingkat *digital divide* yang terjadi di Pekalongan. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Pekalongan menggunakan *e-government* sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, dalam realitanya masih banyak masyarakat Kabupaten Pekalongan yang tidak berkesempatan untuk mendapatkan akses informasi yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan. Hasil dari pengamatan bahwa Kesenjangan digital di Kota Pekalongan menjadi salah satu hambatan dalam pencapaian tujuan penerapan *egovernment*. Kesenjangan digital perlu diukur sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun strategi dan kebijakan pelayanan publik yang berkaitan dengan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode SIBIS dengan menggunakan indikator perilaku penggunaan internet, kegunaan penggunaan internet dan *e-government*.

7. Kesenjangan Digital di Indonesia Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi karya Yayat D. Hidayat

Dalam penelitian tersebut kesenjangan digital di Indonesia terjadi terutama antara wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur, wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Sebagai salah satu gambaran kesenjangan

digital yang terjadi di wilayah timur adalah Provinsi Sulawesi Tenggara, persentase rumah tangga pengguna internet selama tiga bulan terakhir sebanyak 11,63% dari total rumah tangga dengan rincian 29,44% rumah tangga di wilayah perkotaan dan hanya 4,89% di wilayah pedesaan (BPS, 2011). Dari data tersebut menggambarkan bahwa penggunaan internet di Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat rendah, apalagi kemudian dibandingkan antara kota dan pedesaan semakin jelas kesenjangan digitalnya. Ada tiga faktor penyebab kesenjangan digital terjadi di Kabupaten Wakatobi yaitu faktor teknologi yang terkait dengan kesiapan infrastruktur dan kualitas layanan TIK, serta faktor masyarakat sebagai pengguna TIK. Faktor lainnya yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan kapasitas masyarakat.

Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus tunggal holistik (holistic single-case study) yaitu yang menempatkan sebuah kasus sebagai fokus dari penelitian dalam hal ini kesenjangan digital di Kabupaten Wakatobi. Ada beberapa rasionalisasi pemilihan studi kasus sebagai metode penelitian yang digunakan dan pemilihan Kabupaten Wakatobi sebagai lokasi penelitian. Pertama, Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah kepulauan sehingga dalam implementasi TIK mengalami permasalahan yang berbeda dengan wilayah kabupaten yang wilayahnya didominasi oleh daratan. Kedua, Kabupaten Wakatobi merupakan kabupaten pemekaran

yang seperti kebanyakan wilayah pemekaran dengan alasan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki pelayanan publik.

1.5.2 Teori *E-Government*

1. Definisi *E-government*

E-Government adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah yang terkoordinasi satu dengan lainnya secara optimal dengan menggunakan teknologi telematika. *E-Government* harus dipandang sebagai sarana bukan sebagai tujuan. Agar implementasi e-government dapat terlaksana dengan baik perlu diperhatikan faktor teknis dan non teknis yang dapat mempengaruhi keberhasilan. Pada umumnya faktor non-teknis lebih dominan dibandingkan faktor teknis, oleh karena itu pemahaman mendalam terhadap faktor non teknis sangat diperlukan ketika merancang dan mengimplementasikan e-government. Implementasi e-government yang dikaitkan dengan upaya memenuhi kebutuhan semua sektor kegiatan baik dipemerintahan dan masyarakat membutuhkan patron dari pemimpin yang dapat memberikan teladan dan komitmen bersama.

Perkembangan *E-Government* di suatu negara menurut Layne dan Lee dalam Wahid dapat ditinjau dari beberapa tahap evolusi, yaitu dimulai dengan kehadiran pemerintah dalam bentuk web yang menyediakan informasi dasar dan relevan bagi publik (Wahid, 2008). Istilah *E-Government*, seperti juga istilah E-bisnis yang lain, memiliki resiko untuk

dieksploitasi secara berlebihan sehingga membuatnya menjadi rancu. Artikel yang relatif sederhana ini mencoba meluruskan persepsi yang keliru mengenai *E-Government* sekaligus mengupas secara lebih mendetail konsep *E-Government* itu sendiri. Lebih jauh, artikel ini mengajak pembaca untuk melihat kendala dan hambatan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang seperti Indonesia dalam mengimplementasikan konsep ini serta menawarkan beberapa solusi sementara yang dianggap tepat. Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009:113), *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti *wide area Networks* (WAN) internet, mobile computing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya.

Sedangkan dalam buku *E-Government In Action* (2005:5) menguraikan *E-Government* adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (Shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada stakholder yang ada misalnya :

- A. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya
- B. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparan
- C. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat meluli kinerja pelayanan publik

D. Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis

Karena visi tersebut berasal “Dari, Oleh dan Untuk” masyarakat atau komunitas dimana *E-Government* tersebut diimplementasikan, maka masanya akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat setempat. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa *E-Government* adalah upaya untuk penyelenggaraan pamerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efesien.

2. Konsep *E-government*

Konsep *E-Government* dikenal pula tiga jenis klasifikasi, yaitu:

A. *Government to Citizens/consumers*

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi *E-Government* yang paling umum yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain tujuan utama dari dibangunnya aplikasi *E-Government* bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

B. *Government to Business*

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah pembentukan sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda

perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dan menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

C. *Government to Governments*

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya dan lain sebagainya.

3. Penilaian *E-government*

A. Penggunaan *Unified Theory of Acceptance and Use of The Technology* (UTAUT) model

Teori ini dikembangkan oleh Venkatesh, dkk. Teori ini menyediakan alat yang berguna bagi akademisi yang perlu menilai kemungkinan keberhasilan pengenalan *e-government* dan membantu mereka memahami penggerak penerimaan dengan tujuan untuk proaktif mendesain intervensi (termasuk pelatihan, sosialisasi, dan lain- lain.) yang ditargetkan pada populasi pengguna yang mungkin cenderung kurang untuk mengadopsi dan menggunakan sistem baru dalam hal ini penggunaan *e-government*. Dalam UTAUT model memiliki 4 unsur utama yaitu, ekspektasi kinerja sistem informasi pelayanan publik, harapan usaha, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitas penyedia layanan publik.

B. Penggunaan *Information Systems (IS) succes* model

Teori yang berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keberhasilan suatu sistem informasi publik dengan mengidentifikasi, menggambarkan, dan menjelaskan hubungan antara enam dimensi keberhasilan yang paling penting di mana sistem informasi umumnya dievaluasi. Pengembangan awal teori ini dilakukan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean pada tahun 1992. IS succes model sering digunakan dalam penelitian ilmiah, dan dianggap sebagai salah satu teori yang paling berpengaruh dalam penelitian sistem informasi publik berbentuk *e-government*. Unsur penting dalam IS

sukses model adalah kualitas sistem informasi publik dan kualitas informasi publik.

1.5.3 Teori *Open Government*

1. Definisi *Open Government*

Open government adalah salah satu bentuk dari implikasi *e-government*. *Open government* diwujudkan sebagai salah satu jawaban untuk memudahkan pelaksanaan *e-government* di berbagai macam negara. *E-government* dan *open government* tidak dapat dipisahkan serta keduanya adalah konsep yang saling melengkapi dalam usaha mewujudkan *good governance*.

Open Government Indonesia (OGI) adalah sebuah gerakan untuk menjadikan pemerintah lebih terbuka, partisipatif dan inovatif. Gerakan ini pertama kali diresmikan oleh Wakil Presiden Budiono pada tanggal 24 Januari 2012, setelah setahun sebelumnya gerakan ini diinisiasikan sesuai dengan booklet *Open Government* Indonesia pada tahun 2013, dijelaskan bahwa tim inti dalam mengawal gerakan ini adalah Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian pembangunan (UKP-PPP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi Informasi Pusat (KIP), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk

Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Transparency International Indonesia (TII), Gerakan Anti Korupsi Aceh (Gerak Aceh), JARI Indonesia, dan Komite Pemantau Legislatif Makassar (KOPEL) Makassar.

OGI Merupakan bentuk konkrit keseriusan pemerintah Indonesia di dalam melakukan reformasi sektor publik di Indonesia secara menyeluruh. Melalui OGI diharapkan akan lahir ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional. Utamanya di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dengan OGI, pemerintah berupaya untuk membuka pintu sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berkolaborasi dan berperan aktif di dalam menentukan prioritas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dengan kolaborasi yang semakin kuat tersebut diyakini dapat menjadi solusi untuk memperkuat kualitas implementasi kebijakan publik pemerintah. Selain itu juga melalui proses pemerintahan yang terbuka, pemerintah Indonesia yakin akan banyak lahir inovasi-inovasi kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Strategi Open Government di Indonesia

A. Strategi Trek 1

Trek 1 bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat program berjalan yang mendorong keterbukaan. Hal yang melatar-belakangi

dibentuknya Trek 1 ini untuk memberikan dukungan dan apresiasi Kementerian/Lembaga yang selama ini telah mengupayakan beragam program dalam rangka mendorong keterbukaan informasi, meningkatkan layanan publik serta pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaganya.

Pada tahun 2012, rencana aksi dalam trek 1 antara lain meliputi penguatan infrastruktur dan mekanisme di seluruh instansi publik dalam menjawab permintaan informasi, serta pembukaan informasi pengadilan pajak dan pengadilan kasus polisi. Selama tahun 2012 telah terbentuk PPID seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah (secara peraturan), terbentuknya Komisi Informasi Provinsi di 19 Provinsi untuk penyelesaian sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik, adanya publikasi putusan pajak dan layanan permohonan pengurusan SIM serta transparansi hasil ujian SIM melalui situs terkait, dimulainya pelayanan online untuk paspor, visa dan beberapa informasi kementerian perdagangan, perindustrian dan keuangan. Semua ini adalah contoh dari sekian banyak perbaikan pemerintah untuk mendorong keterbukaan.

B. Strategi Trek 2

Trek 2 fokus pada pembangunan infrastruktur teknologi inovasi dalam mendukung keterbukaan dan peningkatan kualitas layanan publik melalui upaya terobosan yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

Tercatat program pembangunan tiga portal yang memuat informasi penting yang langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.

Contohnya adalah :

1) Portal Satu Layanan

Portal Satu Layanan yang diluncurkan pada April 2013 merupakan salah satu sarana yang ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi layanan publik. Portal satu layanan mempunyai hampir 200 informasi layanan dasar masyarakat yang berasal dari berbagai institusi pemerintah, komunitas, dan akademisi. Melalui satu layanan, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi seperti informasi air, informasi listrik, dan pelayanan publik lainnya.

2) Satu Pemerintah

Portal Satu Pemerintah menjadi sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi profil keorganisasian, program, anggaran dan kinerja pemerintah. Masyarakat dapat mengakses informasi dari pemerintah di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Tujuan dibuatnya portal ini adalah untuk memudahkan masyarakat memahami aktivitas dan memonitor kegiatan institusi pemerintah.

3) Satu Peta

Dibuatnya portal Satu Peta yang merupakan inisiatif bersama OGI dan instansi pemerintah, Satu Peta adalah gerakan kolaboratif inter-pemerintah (Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah) dan antara pemerintah dengan publik. Satu Peta bertujuan agar Pemerintah Indonesia memiliki Informasi Geospasial (IG) yang akurat, kredibel, dan otoritatif secara efektif dan efisien. Kolaborasi ini didorong dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan inovasi teknologi, seperti yang ditunjukkan dalam proses penyusunan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB). Satu Peta disajikan dalam laman yang menjadi wadah peta dan informasi spasial dan non-spasial lainnya dalam situs tanahair.indonesia.go.id. Geoportal ini akan menjadi etalase seluruh IG yang bersifat publik untuk memastikan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan inovasi teknologi dapat berjalan. Dengan akses IG kepada publik, penyedia jasa dan informasi IG akan memastikan produk IG yang dihasilkan konsisten dan akurat. Publik juga dapat memberikan masukan dan informasi untuk memperbaiki kualitas IG. Terhitung awal 2014, Geoportal Satu Peta telah terhubung dengan 16 Kementerian/Lembaga, 11 Provinsi, 1 Kabupaten dan 1 Kota secara online.

4) LAPOR!

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial pertama di Indonesia. Berbeda dengan sarana pengaduan lainnya, ketuntasan setiap laporan dapat diawasi oleh publik karena setiap laporan yang telah disahkan akan terpublikasikan pada situs LAPOR! Dan dilengkapi dengan indikator penyelesaian. Laporan juga dapat didukung dan dikomentari sehingga mendorong interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat dapat mengirimkan laporan terkait program pembangunan maupun layanan publik secara mudah melalui berbagai kanal yang tersedia yaitu, situs <http://lapor.go.id>, Short Message Service ke 1708 (tanggal kemerdekaan Indonesia), dan aplikasi telepon pintar untuk BlackBerry dan Android. Dalam mengirimkan laporan, masyarakat tak perlu bingung soal kewenangan pemerintah karena setiap laporan akan didisposisikan secara digital ke instansi terkait di antara 67 instansi pemerintah yang telah terhubung. Diantaranya termasuk seluruh Kementerian, sejumlah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Bandung. Laporan bukan hanya membantu penyelesaian keluhan publik namun juga memudahkan koordinasi antar Kementerian/Lembag

termasuk Pemda dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kedepannya, LAPOR! Akan terus membangun keterhubungan dengan seluruh instansi pemerintah guna menciptakan sarana aspirasi dan pengaduan yang terpadu secara nasional.

C. Strategi Trek 3

1) Daerah Percontohan

Untuk mencapai arahan yang bermanfaat bagi implementasi skala sub-nasional, sebuah daerah percontohan kemudian didesain dan dievaluasi untuk pelaksanaan inisiatif Open Government di daerah. Daerah percontohan adalah kesempatan pertama untuk mengetahui kapabilitas dari suatu sistem dan mengetahui secara langsung bagaimana proses implementasi suatu program atau sistem. Pada tahun 2013 ada 3 daerah yang terpilih menjadi daerah percontohan pelaksanaan inisiatif Open Government. Adanya proyek percontohan ini dapat membantu menemukan permasalahan dan solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi hambatan keterbukaan. Harapannya adalah dapat menjadi contoh bagi daerah lain dan apabila sistem atau program tersebut berhasil maka dapat diimplementasikan ke daerah atau lembaga lain dengan beberapa modifikasi untuk memaksimalkan manfaat.

Implementasi Open Government di daerah percontohan terutama menekankan pada 5 tantangan yang ada yaitu peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan integritas publik, peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya, peningkatan lingkungan yang lebih aman, dan peningkatan akuntabilitas sektor swasta. Kelima tantangan tersebut dijawab melalui daerah percontohan yang secara garis besar terbagi menjadi beberapa fase aktivitas antara lain pemilihan daerah percontohan, desain solusi OGI, serta implementasi dan evaluasi.

Sebagai langkah awal, implementasi gerakan OGI melalui daerah percontohan dilakukan di tiga daerah yaitu Kota Ambon, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Pemilihan dilakukan oleh Tim Inti OGI dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Kota Ambon dapat menjadi satu-satunya daerah percontohan tingkat kota antara lain karena meraih Innovative Government Award dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010, memiliki sistem manajemen finansial publik terbaik menurut Bank Dunia tahun 2009, dan nominasi PU Award 2010 Penataan Ruang Berkelanjutan.

Provinsi Kalteng terpilih karena beberapa alasan antara lain telah memiliki Komisi Informasi Daerah, Peringkat 1 Indeks

Demokrasi Indonesia 2009, menjadi nominasi Innovative Government Awards 2011 dan sejalan dalam prinsip keterbukaan melalui skema REDD+. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pembkab Inhu) terpilih karena pencapaiannya menjadi peringkat 2 nasional PTSP 2011 tingkat kabupaten serta kepemimpinan daerah yang progresif.

Diluar kriteria sebagaimana disebutkan diatas, terdapat kriteria tambahan dalam pemilihan 3 daerah tersebut yaitu: daerah terpilih harus di luar Jawa. Diharapkan dari keberhasilan program pilot project tersebut akan menginspirasi daerah lain yang memiliki infrastruktur serupa bahkan lebih baik bahwa dengan komitmen kuat implementasi program OGI bisa dijalankan.

2) *Model Open Government Partnership (MOGP)*

MOGP adalah sebuah kompetisi dalam bentuk konferensi yang mensimulasikan pertemuan OGP. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam gerakan keterbukaan pemerintah baik di Indonesia maupun di dunia. Melalui MOGP, anak-anak muda diajak untuk mengenal prinsip-prinsip pemerintah terbuka dan terlibat dalam penyuaran aspirasi anak muda dalam mendorong pemerintahan yang terbuka. Seluruh peserta akan mengikuti konferensi

sebagaimana lazimnya Pertemuan Tingkat Tinggi OGP yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan OMS. Artinya, peserta konferensi diberikan peran sebagai perwakilan pemerintah atau OMS suatu Negara untuk membahas isu-isu dari negara yang diwakili dalam tatanan pemikiran global untuk mencari solusi dan berkomitmen bersama dalam mendorong keterbukaan pemerintah. Konferensi MOGP 2013 adalah yang pertama di dunia dan Indonesia dan pemenangnya bergabung dengan delegasi Indonesia menghadiri OGP Summit 2013 di London pada Oktober-November 2013.

3) *E-Transparency Award*

Program ini merupakan kerjasama antara *Paramadina Public Institute and Policy* (PPIP) dengan UKP-PPP. PPIP berperan sebagai penanggung jawab dan pelaksana program ini hingga akhir 2014. Tujuannya adalah membantu kementerian dan lembaga menyediakan dan mengelola informasi dalam situsnya sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kompetisi ini telah secara signifikan mendorong perbaikan situs Kementerian dan Lembaga.

4) Kontes Inovasi Solusi 2014: “SOLUSIMU, Ayo Berinovasi!”

Kontes ini bertujuan melibatkan publik dalam memberikan solusi yang inovatif untuk pemerintah yang lebih baik., sebagai wadah aspirasi masyarakat. Selain tentunya mendorong kepedulian masyarakat untuk mendukung dan terlibat dalam gerakan keterbukaan, OGI. Pada kontes ini ada dua jenis solusi yang diharapkan yaitu solusi inovasi dalam bentuk ide dan solusi komunikasi dalam bentuk infografik. Hasil kumpulan solusi yang disampaikan publik akan menjadi bahan masukan dalam perumusan rencana aksi OGI tahun 2014 – 2015. Karya infografik dari kompetisi ini juga langsung dikomunikasikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda terkait agar bias memanfaatkan karya tersebut dalam rangka meningkatkan layanan publiknya. Lebih jauh lagi, kontes ini merupakan terobosan dari, oleh dan untuk bangsa dan menjadi event terobosan dimana publik secara umum dilibatkan Pemerintah sebagai bagian dari solusi penyelesaian masalah yang ada.

1.5.4 Teori *Digital Divide*

1. Definisi *Digital Divide*

Kesenjangan Digital menurut Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government didefinisikan sebagai keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Definisi lain dikemukakan oleh Van Dijk (2006) adalah kesenjangan antara yang memiliki dan tidak memiliki akses

terhadap komputer dan internet. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kesenjangan digital merupakan perbedaan akses terhadap TIK. Terminologi kesenjangan digital awalnya merujuk pada kesenjangan akses terhadap komputer, namun ketika internet berkembang dengan cepat dan massif di masyarakat maka terminologinya bergeser meliputi kesenjangan akses terhadap komputer dan internet (Van Deursen & Van Dijk, 2010).

Molnar (2003) mengemukakan ada tiga tipe kesenjangan digital yaitu *access divide* atau kesenjangan digital tahap awal yang merujuk pada kesenjangan antara masyarakat yang memiliki akses dan yang tidak memiliki akses terhadap TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Kesenjangan yang berikutnya adalah *usage divide* atau kesenjangan digital primer yang merujuk pada perbedaan penggunaan TIK antara masyarakat yang memiliki akses terhadap TIK. Adapun kesenjangan selanjutnya adalah *quality of use divide* atau kesenjangan digital lapis kedua yang fokus pada perbedaan kualitas penggunaan TIK pada masyarakat yang menggunakan TIK dalam keseharian.

2. Kajian *Digital Divide*

Isu kesenjangan digital menjadi perhatian dari para politisi maupun para peneliti di tahun 1990-an sejak pemerintahan Clinton – Al Gore di Amerika Serikat memperkenalkan istilah digital divide (yang kemudian diartikan kesenjangan digital dalam Bahasa Indonesia) pada 1996 dan secara cepat menjadi isu yang mendunia. Kesenjangan digital merupakan

fenomena yang terjadi secara global. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh negara berkembang tapi juga negara maju seperti Amerika dan negara-negara di Eropa.

Konsep Kesenjangan digital Menurut Chen dan Wellman merupakan kesenjangan dari faktor pengaksesan dan penggunaan internet, yang dibedakan oleh status sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat hidup, etnik, dan lokasi geografi (Wenhong, et al., 2003). Sedangkan konsep kesenjangan digital Berdasarkan Kemly Camacho (Camacho, 2005), konsep kesenjangan digital fokus pada hal sebagai berikut :

- A. Fokus pada Infrastruktur, yaitu berdasarkan perbedaan antara individu yang memiliki infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) serta koneksi internet dengan individu yang tidak memiliki infrastruktur TIK serta koneksi internet.
- B. Fokus pada pencapaian kecakapan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), yaitu antara individu yang berusaha mencapai kecakapan TIK yang dibutuhkan dengan individu yang tidak memiliki upaya mencapai kecakapan TIK yang dibutuhkan.
- C. Fokus pada pemanfaatan sumberdaya, yang didasarkan pada keterbatasan individu untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia di website (melalui internet). Konsep kesenjangan digital tidak hanya mengenai ketidakmampuan untuk mengakses informasi, pengetahuan, tetapi juga dapat menemukan pembelajaran bagaimana mengambil manfaat dari kesempatan baru tersebut,

seperti pengembangan pekerjaan, informasi kesehatan, mencari pekerjaan, dan sebagainya.

Metode yang digunakan untuk mengukur kesenjangan digital yaitu SIBIS (*Statistical Indicators Benchmarking the Information Society*) merupakan suatu proyek komisi Eropa yang berusaha menganalisis serta membandingkan berbagai indikator-indikator kesenjangan digital yang berbeda. Adapun tujuan keseluruhan dari SIBIS yaitu mengembangkan indikator-indikator yang digunakan untuk memonitor perkembangan guna menuju masyarakat informasi. Maka dari itu, SIBIS fokus pada akses serta pemanfaatan dasar seperti kesiapan internet, kesenjangan digital dan keamanan informasi.

SIBIS merupakan proyek komisi Eropa yang berusaha menganalisis serta membandingkan berbagai indikator-indikator kesenjangan digital yang berbeda (SIBIS, 2003). Proyek dari SIBIS sudah berjalan dari awal bulan Januari 2001 hingga bulan September tahun 2003. Adapun tujuan keseluruhan dari SIBIS yaitu mengembangkan indikator-indikator yang digunakan untuk memonitor perkembangan menuju masyarakat informasi (Vehovar, et al., 2006). Dengan berlandaskan pada tujuan tersebut maka SIBIS fokus pada akses serta pemanfaatan dasar seperti kesiapan internet, kesenjangan digital dan keamanan informasi. Variabel-variabel dalam instrumen SIBIS GPS yang akan digunakan untuk menganalisis *digital divide* pada masyarakat Kabupaten Banyumas yaitu sebagai berikut :

A. Aspek Ketersediaan Akses TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Aspek ketersediaan akses TIK menjadi salah satu penyebab kesenjangan digital yang dibedakan antara individu yang dapat mengakses internet dengan individu yang tidak dapat mengakses internet. Ketersediaan akses TIK dibagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu penggunaan peralatan yang lebih baru untuk mengakses internet (telepon genggam, TV digital, sistem operasi yang *up to date*) dan pengguna yang memiliki akses internet lebih dari satu lokasi (di rumah, di kantor)

B. Aspek Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Pemanfaatan TIK menjadi salah satu aspek yang akan digunakan untuk menganalisis kesenjangan digital karena berkaitan dengan aspek ketersediaan akses TIK. Setelah tersedianya akses selanjutnya yaitu bagaimana pengguna dapat memanfaatkan akses tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Yulfitri, 2008). Memanfaatkan TIK menjadikan pekerjaan lebih mudah dan dapat mengembangkan kinerja pekerjaan sehingga lebih efektif dan efisien.

C. Aspek Tingkat Kemampuan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Dengan tersedianya akses TIK maka dibutuhkan kemampuan pengguna dalam mengakses dan mengikuti perkembangan TIK sehingga pemanfaatan akses TIK dapat optimal sesuai yang diharapkan.

Karena dengan banyaknya individu yang memiliki tingkat kemampuan TIK yang tinggi maka dapat mengurangi kesenjangan digital.

D. *E-Government*

Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 *e-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan teknologi informasi dalam proses bisnis membuat organisasi berusaha untuk mengimplementasikan teknologi informasi untuk proses terintegrasi. Tipe penerapan *e-government* menurut Seifert dan Bonham (2003) ada empat yaitu *government to citizens* (G2C), *government to government* (G2G), *government to bussiness* (G2B), dan *government to Employees* (G2E).

E. Demografi

Demografi diartikan sebagai mempelajari jumlah, persebaran, territorial, komposisi penduduk dan perubahannya serta sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena migrasi dan perubahan status. Aspek demografi yang terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.

Berbeda dengan SIBIS, Jan Van Dijk (2000) dalam mengkaji *digital divide* dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

A. Infrastruktur

Infrastruktur adalah hal penting dalam memenuhi sarana teknologi, sarana disini bisa dimasukkan dalam poin-poin khusus seperti tersedianya jaringan listrik yang baik di suatu daerah, jaringan telekomunikasi yang baik yang jadi penentu apakah jaringan internet dapat tersambung dengan baik di suatu daerah. Selain itu faktor infrastruktur ini juga bisa menyangkut perangkat keras dan lunak (program) dari sebuah piranti digital seperti komputer, smartphone dan lain sebagainya.

Infrastruktur lain juga mempengaruhi beberapa aspek seperti salah satunya pendidikan. Infrastruktur TIK dalam dunia pendidikan yang tidak merata sebaiknya diperbaiki sehingga terjadi pembenahan kesenjangan digital sejak dini. Dana pembangunan dalam dunia pendidikan yang tidak teratur mengakibatkan masih ada saja sekolah yang tidak memiliki sarana lab komputer dan akses internet, bila masih banyak hal seperti itu terjadi di daerah, bagaimana kesenjangan digital akan menipis dimasa depan. Jangankan Lab, gedung sekolah yang terancam rubuh saja masih banyak dan tersebar di berbagai daerah.

B. Kekurangan Skill SDM (Sumber Daya Manusia)

Kekurangan Skill SDM disini bisa dikatakan sebagai minat dan kemampuan dari seseorang untuk menggunakan sarana digital. Masih banyak masyarakat yang merasa gugup, takut sehingga enggan menggunakan sarana digital seperti komputer atau laptop. Sebagian

mereka masih tidak ingin menanggung resiko kerusakan dari sarana digital yang tergolong mahal sehingga bila rusak tentunya akan menghabiskan uang yang banyak pula bila rusak.

Bila diperhatikan lebih dalam lagi berarti hal yang mempengaruhi skill SDM dalam menggunakan sarana digital bisa datang dari kesenjangan ekonomi dan kurangnya sosialisasi atau pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan sarana digital.

C. Kekurangan Isi Konten

Kekurangan konten yang paling terbaca disini adalah masih banyaknya masyarakat dengan penggunaan konten di sebuah sarana digital. Hal yang menjadi poin utama dalam permasalahan konten ini adalah kurangnya konten bahasa Indonesia dalam software digital yang ada. Mungkin di daerah yang masih berdekatan dengan kota-kota besar sudah banyak masyarakat yang memahami bahasa Inggris sehingga tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi dalam sarana digital tertentu, tetapi bagaimana kabar dari saudara-saudara kita di daerah seperti yang disebutkan diatas, mereka yang masih belum memiliki jaringan Internet, bahkan listrik. Apakah mereka bisa paham menggunakan sarana digital yang di dominasi oleh perangkat berbahasa asing (Inggris).

D. Kekurangan dalam Penggunaan Internet Sendiri

Kesenjangan Digital ternyata tidak hanya berbicara mengenai sarana dan skill. Tetapi penggunaan Sarana digital dengan lebih bijaksana dan

memberikan manfaat yang lebih besar untuk kesejahteraan informasi pada masyarakat. Internet dan jaringan Telekomunikasi saat ini bukan hanya untuk menghubungkan antara satu orang dengan kerabat di tempat yang jauh atau game online. Tetapi kemampuan digital saat ini juga bisa untuk mengakses informasi mengenai hal terkini dan memberikan banyak informasi yang sifatnya memberikan edukasi kepada khalayak. Sarana digital akan sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat bila mereka paham dan mengerti tentang penggunaannya.

1.6 Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan menggunakan hipotesis yang ada pada metode SIBIS (*Statistical Indicators Benchmarking the Information Society*) yaitu :

Variabel penelitiannya adalah :

1. Digital Divide dengan indikator sebagai berikut :
 - A. Ketersediaan akses TIK (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi)
 - B. Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
 - C. Pencapaian kemampuan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
 - D. Aspek *e-government*
 - E. Aspek demografi

1.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan *digital divide* yang muncul dalam kebijakan *open government* di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil *preliminary research* yang sudah dilakukan menyebutkan bahwa masih bervariasinya pengetahuan masyarakat tentang aplikasi *Banyumas Open Data* dan website *www.banyumaskab.go.id* dalam mengakses informasi pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Masih bervariasinya pengetahuan masyarakat dalam mengakses informasi menunjukkan bahwa *digital divide* muncul dalam masyarakat Kabupaten Banyumas. *Digital divide* dapat muncul di berbagai kelompok masyarakat berdasarkan pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, kemampuan, dan lain-lain.

Digital Divide atau kesenjangan digital adalah suatu keadaan dimana masyarakat mengalami keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi (Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003). Menurut SIBIS (*Statistical Indicators Benchmarking the Information Society*) terdapat indikator-indikator yang mempengaruhi timbulnya *digital divide* dalam masyarakat, yaitu :

1. Ketersediaan Akses TIK (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi)
2. Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
3. Pencapaian kemampuan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
4. Aspek *e-government*
5. Aspek demografi

Seluruh indikator yang sudah ditentukan oleh SIBIS, tersebut nantinya akan diturunkan menjadi beberapa sub indikator untuk kemudian digunakan sebagai alat utama dalam menilai bentuk *digital divide* yang muncul dalam kebijakan *open government* di Kabupaten Banyumas. Untuk indikator Ketersediaan Akses peneliti menggunakan teori dari Jan Van Dijk karena teori tersebut mendeskripsikan salah satu faktor dari *digital divide* adalah Infrastruktur yang mana penjelasan dari faktor infrastruktur lebih relevan dengan keadaan masyarakat di Indonesia. Berikut adalah gambaran mudah kerangka berpikir dalam penelitian ini :

Digital Divide	
Indikator	Sub Indikator
a) Ketersediaan Akses TIK (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perangkat keras seperti komputer atau <i>handphone</i> • Pengguna terbiasa menggunakan jasa internet <i>service provider</i> dalam mengakses internet
b) Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menemukan informasi melalui internet setiap hari • Menggunakan internet untuk memperoleh informasi secara <i>online</i> • Menggunakan internet untuk mempermudah pekerjaan agar lebih efektif dan efisien
c) Pencapaian kemampuan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengakses dan mengikuti perkembangan TIK dalam penggunaannya

<p>d) Aspek <i>e-government</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pencarian informasi pemerintah melalui layanan <i>e-government</i> • Kemudahan layanan <i>e-government</i> • Keyakinan kebenaran informasi yang diperoleh dari <i>e-government</i> • Kemudahan dalam mengakses laman yang disediakan pemerintah
<p>e) Aspek demografi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Usia pengguna • Jenis kelamin pengguna • Pekerjaan • Latar Belakang Pendidikan

Tabel 1.7.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan tabel 1.7.1 mengenai kerangka berpikir maka peneliti dapat menemukan indikator dan sub indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk indikator yang digunakan sudah peneliti sampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa indikator tersebut mengacu pada SIBIS dan teori Jan Van Dijk. Masing-masing dari indikator mempunyai sub indikator dan jumlahnya setiap indikator berbeda-beda karena menyesuaikan dengan topik penelitian. Untuk indikator Ketersediaan Akses TIK (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi), sub

indikator yang digunakan peneliti didapatkan dari penjelasan mengenai indikator tersebut bahwa perlu adanya fasilitas dalam hal ini perangkat keras untuk mengakses internet dan infrastruktur pendukung yang dalam hal ini adalah internet *service provider*. Untuk indikator Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, sub indikator yang digunakan peneliti didapatkan dari penjelasan indikator tersebut bahwa bagaimana pengguna TIK mengakses informasi secara *online* serta menggunakan akses internet secara efektif dan efisien. Untuk indikator Pencapaian kemampuan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, sub indikator yang digunakan peneliti didapatkan dari penjelasan indikator tersebut bahwa bagaimana pengguna TIK mengoptimalkan ketersediaan akses internet maupun TIK dan mampu mengikuti perkembangan yang ada. Untuk indikator Aspek *e-government*, sub indikator yang digunakan peneliti didapatkan dari penjelasan indikator tersebut bahwa bagaimana pengguna dalam mengakses informasi mengenai pemerintahan, layanan *e-government* yang disediakan harus memiliki rasa kenyamanan dan kemudahan dalam mengaksesnya, informasi yang disediakan pemerintah melalui *e-government* harus bersifat faktual dan kebenarannya dapat dipercaya. Untuk indikator Aspek demografi, sub indikator yang digunakan peneliti didapatkan dari pengertian dari indikator tersebut bahwa demografi dapat meliputi komposisi penduduk yang mana dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan komposisi umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan untuk menyesuaikan dengan topik penelitian.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan tipe penelitian kuantitatif deskriptif. Bentuk deskriptif artinya mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Penelitian kuantitatif deskriptif yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel sendiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Selain kuantitatif deskriptif penelitian ini juga dibantu dengan metode SIBIS (*Statistical Indicators Benchmarking the Information Society*) untuk mempermudah dalam menjabarkan keadaan masyarakat mengenai akses informasi publik.

1.8.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subjek yang mempunyai kuantitas & karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Banyumas yang berusia 17 – 55 tahun.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh

sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau dapat mewakili.

Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2012:91) untuk menentukan jumlah sampel adalah sebagai berikut Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30-500 bila sampel dibagi kategori jumlah anggota sampel setiap kategori maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali variabel yang diteliti. Oleh karena itu sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 160 orang masyarakat Kabupaten Banyumas.

Jumlah angka tersebut didapatkan melalui metode pengambilan sampel yang menggunakan teknik cluster sampling, mengingat jumlah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas berjumlah 27 kecamatan hal tersebut membuat peneliti memiliki keterbatasan secara populasi geografis dan keterbatasan biaya, maka peneliti hanya mengambil 4 (empat) kecamatan dengan jumlah populasi terbesar yang ada di Kabupaten Banyumas karena kecamatan tersebut dinilai dapat mewakili seluruh kecamatan yang ada. Setelah mendapatkan 4 (empat) kecamatan maka, peneliti menentukan jumlah sampel dari setiap kecamatan yang ditentukan sesuai dengan Roscoe dalam Sugiyono (2012:91) jika jumlah anggota sampel yang terdapat dalam sebuah kategori minimal 30. Jumlah anggota sampel yang didapatkan $40 \times 4 = 160$ sehingga jumlah sampel minimal 160 sudah dapat

mewakili penelitian dan pada penelitian ini penulis memakai sampel sebanyak 160 sampel.

1.8.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Cluster Sampling, teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil. Sesuai dengan namanya, penarikan sampel ini didasarkan pada gugus atau cluster. Teknik cluster sampling digunakan jika catatan lengkap tentang semua anggota populasi tidak diperoleh serta keterbatasan biaya dan populasi geografis elemen-elemen populasi berjauhan. Untuk cluster yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 4 cluster yang terdiri dari Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Utara, dan Kecamatan Purwokerto Selatan. Jumlah sample yang digunakan dalam setiap cluster yaitu berjumlah 40.

1.8.4 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Banyumas.

Situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang sudah dikemukakan dalam bab

terdahulu, maka penetapan situs penelitian adalah Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Utara, dan Kecamatan Purwokerto Selatan, keempat kecamatan tersebut diambil karena kecamatan-kecamatan tersebut memiliki jumlah populasi terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Banyumas.

1.8.5 Jenis dan Sumber Data

1.8.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif (numerik). Data yang berbentuk angka-angka yang empiris terukur dan teramati.

1.8.5.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Sumber data primer yang digunakan berdasarkan dari hasil pengisian kuesioner yang telah diisi oleh para responden. Para responden berasal dari masyarakat kabupaten Banyumas dengan rentang usia 17 hingga 55 tahun dan responden juga berasal dari strata yang berbeda (pekerja, pelajar, dan lain-lain).

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi literasi yang sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Sumber sekunder dapat berupa jurnal penelitian, buku, maupun artikel ilmiah yang berhubungan dengan *Digital divide* dan *Open government*. Pengumpulan data akan dilakukan pada hari rabu 29 April 2020 sampai dengan jumat 8 Mei 2020. Kegiatan pengumpulan data dibantu oleh rekan-rekan peneliti dengan menyebarkan

kuesioner melalui *link*/tautan yang sebelumnya sudah disambungkan melalui *Google Form* untuk kemudian *link*/tautan tersebut disebarakan ke seluruh media sosial seperti *WhatsApp*, *LINE*, *Instagram* dan media sosial lainnya yang mendukung.

1.8.6 Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan menggunakan variabel- variabel yang ada dalam SIBIS GPS (2003) berdasarkan Ketersediaan akses TIK, Pemanfaatan TIK, Kemampuan TIK, *E-government*, dan Demografi dikategorikan menjadi 5 yaitu :

- A. Indeks $< 20.00\%$ = sangat tinggi
- B. $20.00\% \leq$ Indeks $< 40.00\%$ = tinggi
- C. $40.00\% \leq$ Indeks $< 60.00\%$ = sedang
- D. $60.00\% \leq$ Indeks $< 80.00\%$ = rendah
- E. Indeks $\geq 80.00\%$ = sangat rendah

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini diperoleh melalui survey dengan melakukan penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara menyebarkan *web-link* kuesioner yang sebelumnya sudah dibuat oleh peneliti melalui media *Survey Monkey* dan *Google Form*, lalu disebarakan melalui media sosial seperti *WhatsApp*, *LINE*, *Instagram*, dan media sosial lainnya yang mendukung penyebaran kuesioner ini. Setelah kuesioner didapatkan kemudian dilakukan penyaringan dengan cara mengecek setiap jawaban yang didapatkan dengan pertanyaan kuesioner jika ada jawaban yang tidak dijawab dalam pertanyaan maka kuesioner dianggap tidak layak untuk dianalisis.

Skala yang digunakan untuk menilai setiap pertanyaan yang ada adalah skala likert lima angka, yang mana setiap pertanyaan dalam kuesioner tersebut memiliki bobot 1-5 sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
- B. Skor 2 : Tidak Setuju (TS)
- C. Skor 3 : Kurang Setuju (KS)
- D. Skor 4 : Setuju (S)
- E. Skor 5 : Sangat Setuju (SS)

Indikator-indikator kuesioner dimodifikasi sesuai dengan batasan penelitian. Pada penelitian ini kuesioner yang digunakan berdasarkan rumus index % yang fleksibel, dan sangat luas.

1.8.8 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk metode yang sangat sederhana. Metode ini hanya mendeskripsikan kondisi dari data yang sudah peneliti miliki dan menyajikannya dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian-uraian singkat dan terbatas. Statistika deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensi atau kesimpulan apapun tentang data tersebut. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini kemudian dikategorikan berdasarkan indeks penilaian *digital divide* atau kesenjangan digital yang sebelumnya sudah diuraikan melalui skala pengukuran SIBIS GPS. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *digital divide* peneliti akan menggunakan data yang didapatkan melalui kuesioner kemudian hasil data tersebut disesuaikan dengan referensi yang peneliti miliki untuk kemudian dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi *digital divide*.

